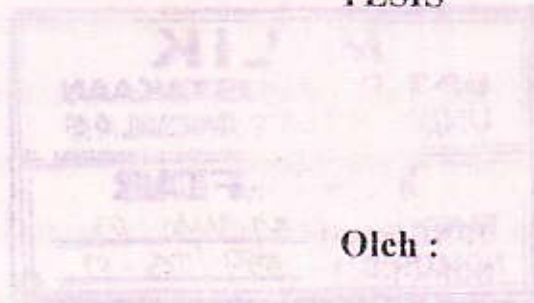


**PENGELOLAAN
PASAR-PASAR NAGARI DI KABUPATEN AGAM:
SUATU TINJAUAN KELEMBAGAAN**

TESIS



Oleh :

SYATRIA

00 202 004



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2002**

**Pengelolaan Pasar Nagari di Kabupaten Agam :
Suatu Tinjauan Kelembagaan**

Oleh : Syatria

(Dibawah bimbingan Helmi dan Nursyirwan Effendi)

Ringkasan

Pasar Nagari adalah salah satu dari harta kekayaan nagari, yang merupakan sumber pendapatan nagari. Namun di beberapa daerah kabupaten di Sumatera Barat, pendapatan dari Pasar Nagari masih belum diharapkan banyak, karena berbagai persoalan pengelolaan yang melilitnya. Untuk itu penelitian ini mencoba melihat pengelolaan Pasar Nagari dan pola kelembagaannya dikaitkan dengan era kembali ke nagari. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana Pasar Nagari dikelola dan apa penyebabnya, untuk mengetahui bagaimana pola kelembagaan Pasar Nagari, untuk menentukan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan Pasar Nagari di era kembali ke nagari.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Agam, dengan sampel empat buah Pasar Nagari yang memiliki spesifikasi pengelolaan yang berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder tentang pengelolaan pasar dari masing-masing sampel melalui responden yang dipilih secara purposif dan proporsional dari orang-orang yang terlibat langsung dan terimplikasi dengan kebijakan pengelolaan pasar. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, Pasar-pasar Nagari yang menjadi sampel penelitian ini belum semuanya dikelola dengan baik, seperti Pasar Palembayan



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas dan nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah, maka lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menyikapi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, di Sumatera Barat dilahirkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Adanya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mengefektifkan Pemerintahan Nagari serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini ditinggalkan dan diabaikan.

Berbicara tentang kemandirian berarti juga membicarakan kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebab Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah mengurus rumah tangganya sendiri (Pamudji, 1980).

Hal ini tentunya tidak terlepas juga terhadap pemerintahan nagari selaku pemerintahan otonom tingkat terendah yang juga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya pemerintahan, dan pembangunan nagari. Dan sumber keuangan nagari ini dapat diperoleh dari harta benda kekayaan milik nagari. Secara klasik harta benda dan kekayaan nagari meliputi : basawah baladang, badusun bagalanggan, baitiak baayam, baanak bakamanakan, bakabau bakambiang, batabek taman-taman, bajorong bakampung, bacupak bagantang, baadat balimbago, batapian tampek mandi (Hanafi, 1970). Dan secara yuridis didalam Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dinyatakan beragam harta kekayaan nagari secara lebih formal. Sementara Pasal 8 menyatakan beberapa sumber pendapatan dan penerimaan nagari yang dapat menjadi harta benda dan kekayaan nagari.

Pasal 7 sampai dengan 14 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 ini telah memberikan dasar bagi nagari-nagari di Sumatera Barat dalam menentukan harta kekayaan, pendapatan dan penerimaan nagari. Diantara beberapa harta kekayaan nagari tersebut adalah Pasar Nagari, sebagai aset nagari potensial (Effendi, 2001) yang merupakan salah satu sumber pendapatan nagari dalam membangun ekonomi nagari yang selama ini pengelolaannya dilakukan oleh Nagari / Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama pemerintah tingkat atasnya.

Selama ini yang terjadi di beberapa daerah kabupaten di Sumatera Barat, pendapatan dari kekayaan nagari belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk nagari (Taifur, 2000), disamping pengelolaan Pasar

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasar-pasar Nagari yang menjadi sampel penelitian ini belum semuanya dikelola dengan baik, seperti Pasar Palembang dan Pakan Kamis, penyebabnya adalah karena minimnya fasilitas sehingga berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan pasar, penyebab lainnya adalah Pengelola Pasar yang tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya masing-masing, tidak jalannya fungsi Pengelola Pasar ini dipengaruhi oleh minimnya insentif yang diterima, kuatnya tekanan birokrasi dan lemahnya posisi tawar sumber daya manusia organisasi lokal. Sedangkan Pasar Nagari yang sudah dikelola dengan baik seperti Pasar Palupuh dan Pasar Baso, penyebabnya adalah fasilitas pasar yang lebih lengkap, Pengelola Pasar telah menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berjalannya fungsi Pengelola Pasar disebabkan juga oleh karena insentif yang diterima cukup baik, tidak adanya intervensi Pemerintah seperti di Pasar Palupuh dan kuatnya posisi tawar lembaga lokal terhadap pemerintah seperti di Pasar Baso.
2. Pola kelembagaan yang ditemui pada Pasar Palupuh adalah, independen, muncul atas prakarsa masyarakat dan kekayaan swadaya, ada tokoh kunci

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas, 1999. Pemberdayaan Kelembagaan Pedesaan dan Nagari di Sumatera Barat (Laporan Penelitian)
- Berger D.I dan R.J Neuheus 1977. *To Empower People of Mediating Structure in Public Policy* Washington American Institute for Public Policy Research PPI-7
- Bodgan dan Taylor, dalam Lexy Maleong, 1990. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Karya Bandung.
- Braverman, A & K,Hoff, 1993. *The Economic of Rural Organization, Theory, Practice and policy of Fond* University New York
- Carrol. TE, 1992. *Intermediary NGOs. The Supporting Link in Grassrots Development*, Connecticut Kumarian Press, USA
- Djoni, A.1996 Pengembangan Lumbung Pith Nagari sebuah Perspektif Lembaga Tesis S2 Program Pascasarjana Unand Padang
- Eaton.JW (ed).1986, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi, UI Press, Jakarta
- Effendi, Nusyirwan, 1999. *Minangkabau Rural Markets : Their System, Roles and Function in The Market Community of West Sumatera*, Indonesia. Disertasi pada Faculty of Sociology, University of Bielefeld, Germany.
- Effendi, Nusyirwan. 2001. Pengelolaan Harta Benda Kekayaan Milik Nagari, Seminar PPS Unand, Padang
- Evaliza. 1995, Analisa Kemiskinan di Desa Tertinggal, Tesis S2 Program PPS Unand Padang
- Goodman. PS.1980, *Critical Issues in Assesing Organizational Effectiveness*, dalam Edwar Lawler (ed), New York.
- Harian Mimbar Minang. Tanggal 3 Agustus 2001, Padang